

PEMERINTAH DAERAH – AKUNTANSI

2024

PERBUP NO. 19, BD 2024/NO. 19 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 266 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 19 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Demi terselenggaranya tertib pengelolaan keuangan daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah serta mengingat Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.
 - Bahwa Peraturan Bupati ini diatur mengenai kebijakan akuntansi pemerintah daerah menerapkan SAP berbasis akrual, yang terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun. Mengenai laporan keuangan pemerintah daerah yaitu merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan skpd selaku entitas akuntansi. Bahwa dalam Peraturan Bupati ini diatur juga mengenai kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah, penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran berbasis kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi transfer, akuntansi pembiayaan, akuntansi pendapatan-LO, akuntansi beban, akuntansi aset, akuntansi kewajiban, penerapan kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang dihentikan, laporan keuangan konsolidasi, peristiwa setelah tanggal pelaporan serta properti investasi.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Agustus 2024.
- Pada saat Perbup ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran : 259 hlm.